



# MIMIKA

## MEMBANGUN

*Eme Neme Yauware*



## Salam Redaksi

Pembaca yang terhormat, Media Bappeda ini kami hadirkan sebagai implementasi dari tanggungjawab kami untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap dan benar atas berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Mimika.

Percepatan pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah, baik infrastruktur maupun pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia, serta mental spiritual, secara bersamaan dan sinergis, dengan melibatkan semua unsur dalam pemerintahan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Media ini adalah dokumentasi atas sebagian dari perjalanan pembangunan di Kabupaten Mimika. Kami persembahkan untuk seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu sumber informasi atas kiprah pemerintah yang benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk peningkatan kualitas Media ini dan bagi kemajuan pembangunan di Mimika.

Tim Redaksi

### Pengarah

Bupati Mimika

### Penanggungjawab

Kepala Bappeda

### Tim Redaksi Koordinator

Sekretaris Bappeda Mimika

### Anggota :

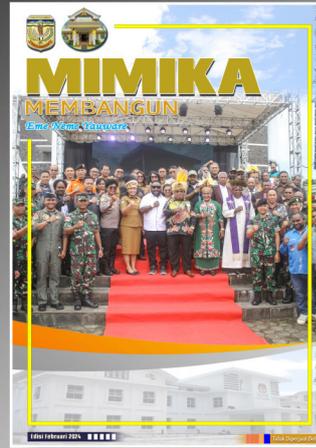
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan Ekonomi

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Pengendalian

Kantor Bappeda Kabupaten Mimika  
Jl. Cendrawasih SP.II, Utikini Baru,  
Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. 99963



# Mimika Membangun Edisi Februari

## Daftar Isi

- Laporan Utama Hal. 3-8
- Laporan Khusus Hal. 9-19
- Bidang Infrastruktur Hal. 20-27
- Bidang Ekonomi Hal. 28-37
- Bidang Sosial Budaya Hal. 38-47



# Bupati Resmikan 11 Gedung Kantor Baru

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika memiliki 11 fasilitas baru berupa gedung kantor pemerintahan. Fasilitas ini diresmikan oleh Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH pada Selasa (20/2/2024) yang dipusatkan di Kantor Pusat Pemerintahan dirangkaikan dengan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR).



**Dr Eltinus Omaleng, SE MH Meresmikan 11 gedung kantor pemerintahan pada Selasa (20/2/2024) yang dipusatkan di Kantor Pusat Pemerintahan dirangkaikan dengan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR)**

Foto: Bappeda



Gedung kantor baru yang diresmikan antara lain Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Instalasi Rawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah (IRD RSUD), Lapak Daging Babi Dinas Peternakan, Kantor Distrik Mimika Baru, Kantor Distrik Mimika Timur, Galeri

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kantor Instalasi Pengujian Alat Ukur, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Bupati Omaleng menyampaikan bahwa pembangunan gedung-gedung kantor ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Gedung kantor baru ini diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja dan kinerja pegawai dalam mem-

berikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

“Dengan selesainya beberapa pembangunan gedung kantor ini, saya optimis semangat kerja dan kinerja bapak ibu sekalian akan semakin meningkat sehingga dapat memberikan sumbangsiah kepada masyarakat dan pemerintah daerah yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah,” ungkap Bupati Omaleng.





Selanjutnya, Bupati Omaleng mengimbau agar gedung-gedung baru ini dimanfaatkan dengan baik sesuai fungsinya dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pembangunan gedung kantor baru ini dianggap sebagai berkat Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam kegiatan KKR yang mengawali peresmian ini, Bupati mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan.

Sebagai Orang Asli Papua (OAP), Bupati menekankan pentingnya menjaga tanah ini dari pesisir, gunung, lembah hingga salju. Meskipun terdapat tantangan dalam menjaga kekayaan alam, Bupati mengajak seluruh anak adat untuk bersama-sama menjaga tanah ini. Ia menuturkan bahwa sebagai anak adat, selalu harus bersyukur dan berterima kasih atas anugrah dan

kuasa Tuhan.

Setelah KKR dan peresmian 11 gedung kantor baru, Pemkab Mimika melanjutkan dengan menggelar acara bertajuk "Mimika Bersyukur," yang dihadiri oleh para pegawai dan masyarakat, serta menampilkan penampilan dari berbagai artis, seperti Mitha Talahatu, Nobo Indonesian Idol, dan band-band lokal. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda



**IRD RSUD Mimika**



**Kantor Bapenda**





**Kantor BPKAD**



**Kantor Distrik Mimika Baru**





**Kantor Bappeda**



**Lapak daging babi di Pasar Sentral.**



# Bupati Mimika Mencoblos di TPS 19 Timika Jaya

**H**ARI pencoblosan Pemilihan Umum telah tiba, dan masyarakat pemilih berbondong-bondong menuju Tempat Pemilihan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak suara mereka. Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng, SE, MH, tidak ketinggalan untuk memberikan suaranya, mendatangi TPS 19 di Kelurahan Timika Jaya.



Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng, SE, MH, memberikan hak suaranya

Foto: Bappeda



Bupati Omaleng tiba di TPS yang berlokasi dekat kediamannya sekitar pukul 07.54 WIT pada Rabu (14/2/2024). Ia menjadi orang pertama yang memberikan suara di TPS tersebut.

Usai mencoblos, Bupati Omaleng menyampaikan pandangannya, menyatakan bahwa semua yang terpilih, baik untuk DPRD Kabupaten, DPR Papua Tengah, DPR RI, DPD RI,

dan Presiden, merupakan pilihan Tuhan. “Yang terpilih itu adalah pilihan Tuhan yang dipilih melalui suara masyarakat, sehingga apapun hasilnya harus diterima dengan lapang dada,” ujarnya.

Bupati juga menyampaikan harapannya agar pihak yang tidak terpilih dapat menerima hasil pemilihan dengan lapang dada dan tidak melakukan



tindakan yang dapat menimbulkan kerusuhan atau ketidaknyamanan di masyarakat.

Pemilu kali ini menjadi penentu bagi sosok yang akan menduduki kursi DPRD Mimika selama lima tahun ke depan. Bupati Omaleng berharap bahwa para wakil rakyat yang terpilih dapat bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendukung kelanca-

ran program pembangunan sesuai dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan menunjukkan partisipasinya dalam pemilu, Bupati Omaleng memberikan contoh kepemimpinan yang mendukung demokrasi dan proses pemilihan umum sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam menentukan arah pembangunan daerah.(BAPPEDA)

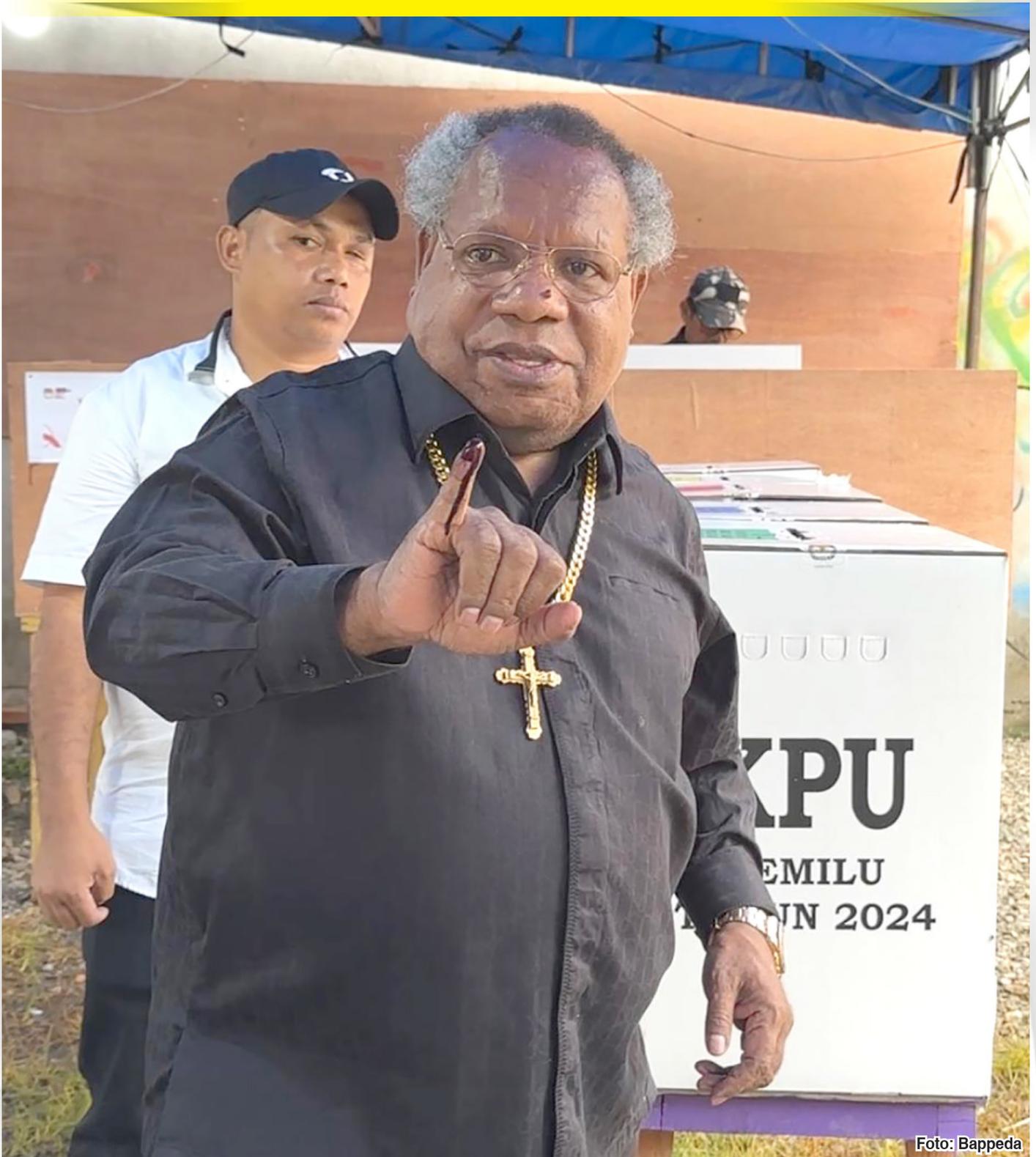


Foto: Bappeda



# Bupati Lantik Ida Wahyuni sebagai Pj Sekda Mimika

**B**UPATI Kabupaten Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH melantik Dr Ida Wahyuni, SSTP MEC Dev sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika di Pendopo Rumah Negara SP 3 pada Kamis (1/2). Ida Wahyuni menggantikan Robert Mayaut yang baru saja dilantik pada 30 Oktober 2023 lalu.



Foto: Bappeda



Foto: Bappeda

Ida Wahyuni, yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika, telah memiliki pengalaman dalam berbagai jabatan di lingkungan pemerintahan daerah. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Bagian Humas Setda Mimika.

Proses pelantikan Pj Sekda baru ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 821.2-01 dan surat Persetujuan Pejabat Gubernur Papua

Tengah nomor 800.1.1.3/112/ppt, yang diterbitkan pada 31 Januari 2024.

Masa jabatan Ida Wahyuni sebagai Pj Sekda berlaku paling lama selama 3 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan/atau berhenti pada saat dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika definitif.

Dalam sambutannya, Bupati Eltinus Omaleng menekankan beberapa tugas strategis yang harus diemban oleh Pj Sekda baru. Ia menugaskan Ida Wahyuni untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Ida Wahyuni diminta untuk membantu persiapan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah definitif Kabupaten Mimika.

"Pj Sekda baru kami ditugaskan untuk membantu saya dan segera mempersiapkan pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama Sekre-

taris Daerah definitif Kabupaten Mimika," ujar Bupati Eltinus Omaleng.

Bupati juga menekankan pentingnya percepatan pembagian Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia berharap agar seluruh pimpinan OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mempertahankan dan meningkatkan integritas, loyalitas, serta disiplin dalam menjalankan tugas





dan tanggung jawab mereka.

Ida Wahyuni, menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan tugas-tugas penataan birokrasi dan lainnya. Prioritasnya adalah menyelesaikan seleksi terbuka Sekda definitif, Kepala OPD, dan job fit kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Mungkin tugas-tugas itu kami (Ida) prioritas-kan untuk segera, secepatnya selesai,” kata

Ida Wahyuni. Ia berharap dapat bekerja sama dengan pimpinan OPD dan seluruh ASN dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.

Kepemimpinan Ida Wahyuni sebagai Pj Sekda diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pemerintahan daerah, sekaligus menjalankan tugas-tugas strategis yang diberikan oleh Bupati Mimika. **(BAPPEDA)**



Foto: Bappeda



# Bupati dan Forkopimda Pantau Kesiapan Pemilu di Mimika

**S**EHARI menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Rabu (14/2/2024), Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng, SE, MH, didampingi oleh Kapolres Mimika, AKBP I Gede

Putra, melakukan pemantauan kesiapan Pemilu di tiga distrik, yaitu Distrik Wania, Distrik Kwamki Narama, dan Distrik Mimika Baru.

Ketika melakukan kunjungan, Bupati

Omaleng mendengar beberapa keluhan yang menjadi kendala. Di Distrik Wania, terdapat laporan bahwa honor Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Kamoro Jaya dipotong,



Foto: Bappeda



seharusnya sejumlah Rp 3,5 juta menjadi Rp 1,3 juta. Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra, membenarkan adanya laporan tersebut dan mengatakan bahwa kepolisian sedang berupaya menyelesaikan masalah tersebut untuk memastikan kelancaran pemilu.

Di Distrik Wania, Kepala Distrik Mathius Sedan menambahkan bahwa persiapan Pemilu di distrik tersebut sudah berjalan. Namun, kendala muncul terkait tempat rekapitulasi suara tingkat distrik karena dana untuk sewa tempat tidak tersedia. Oleh karena itu, Pemerintah Distrik Wania telah mengambil kebijakan untuk membantu menyewa Gedung Tongkonan sebagai tempat rekapitulasi.

Di Distrik Kwamki Narama, meskipun ada beberapa persoalan, seperti pergeseran TPS, namun situasi dan kondisi jelang Pemilu dipastikan aman. Bupati Omaleng meminta agar penempatan TPS didasarkan pada hasil pleno dan tidak boleh dipindahkan. Terkait tempat rekapitulasi tingkat distrik, Pemerintah Distrik Kwamki Narama juga telah bersedia mendukung dan berencana melakukan rekapitulasi di hotel yang ada di Timika dengan pertimbangan keamanan.

Distrik Mimika Baru, dengan jumlah pemilih terbanyak, memiliki 400 TPS dan 140 ribu pemilih. Bupati menekankan agar para penyelenggara, mulai dari PPD sampai KPPS, beker-

ja dengan baik dan saling berkoordinasi untuk mencegah adanya kecurangan.

Sekretaris KPU Mimika, Rony Toisuta, menjelaskan terkait C1-KWK plano yang sempat membuat masyarakat heboh. Ia menegaskan bahwa pada Pemilu kali ini C1-KWK tidak memiliki hologram. "Tidak ada istilah hologram karena menggunakan barcode untuk Sirekap," jelasnya.

Kapolres Mimika, I Gede Putra, juga meminta semua penyelenggara untuk meningkatkan koordinasi. Jika ada permasalahan di tingkat TPS, diharapkan dapat segera dikomunikasikan agar dapat diselesaikan dengan cepat. **(BAPPEDA)**



Foto: Bappeda

# Bupati Hadiri Pembukaan Pleno Rekapitulasi Pemilu



**S**ESUAI jadwal yang sudah ditetapkan, rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten harus dilakukan mulai 17 Februari hingga 5 Maret 2024 mendatang. Untuk itu KPU Mimika mulai melakukan pleno meski belum semua distrik menyelesaikan rekapitulasi.





Pleno rekapitulasi dan penetapan perhitungan hasil perolehan suara Pemilu 2024 resmi dibuka oleh KPU Mimika pada Selasa (27/2/2024) di Hotel Cartenz Timika. Rapat yang dihadiri Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH itu dipimpin oleh Ketua KPU Mimika, Dete Abugau bersama empat komisioner lainnya.

Terkait tahapan yang masih berjalan Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH meminta masyarakat tetap tenang. "Semua masyarakat kita tunggu saja sesuai tahapan ini jangan ikut provokasi, demo dan lain-lain,"

ujar Bupati Omaleng.

Ia berharap masyarakat memberi kesempatan kepada KPU sebagai penyelenggara untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan. Jangan sampai dengan adanya persoalan ini justru membuat tahapan jadi terhalang dan tidak selesai tepat waktu.

Masyarakat kata Bupati tetap bisa mengawal suara yang sudah diberikan saat pemilu 14 Februari lalu sampai adanya penetapan resmi dari KPU. "Bagaimanapun hasilnya harus diterima," tegas Bupati Omaleng. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

# Bupati Mimika Serahkan DPA OPD



**B**UPATI Kabupaten Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah awal pelaksanaan anggaran tahun 2024.

Penyerahan DPA yang dilaksanakan pada Selasa (13/2/2024) ini dilakukan sebagai pedoman bagi setiap OPD dalam melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



tahun ini.

Dalam sambutannya, Bupati Mimika menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan APBD secara tepat waktu agar tidak menimbulkan penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran. "Kami berharap agar kegiatan di APBD segera dilaksanakan sehingga dapat berjalan lancar dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran," ujar Eltinus Omaleng.

Bupati juga menekankan pentingnya pelaksanaan sistem keuangan yang baik, administrasi yang tertib, serta tepat sasaran. "Melaksanakan sistem keuangan yang dapat dilaksanakan dengan baik, tertib administrasi, tepat sasaran merupakan hal yang

sangat penting dalam pelaksanaan APBD," tambahnya.

Dalam acara penyerahan DPA ini, Bupati Mimika menegaskan beberapa hal kepada para penanggungjawab anggaran di daerah diantaranya, wajib melaksanakan kegiatan yang termuat dalam DPA dengan tanggung jawab yang tinggi. Menjalankan mekanisme dan prosedur pelaksanaan dengan sungguh-sungguh untuk memastikan transparansi.

Bupati meminta OPD melakukan evaluasi dan pengawasan selama kegiatan berlangsung guna mencapai kesuksesan administrasi dengan sasaran kegiatan yang diinginkan.

Menganalisis dan mempertimbangkan manfaat kegiatan yang dinikmati masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Bertanggung jawab secara berkala dan teratur terhadap anggaran yang menjadi tanggung jawab dalam rangka percepatan pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan.

Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang. "Mari berpartisipasi dalam Pemilu 14 Februari, jangan golput. Mari gunakan hak pilih karena hak pilih menentukan arah bangsa di masa depan," tutupnya. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

# Pemkab Mimika Siap Hibahkan Bangunan dan Barang untuk Instansi Vertikal

**P**EMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika pada Tahun 2024 ini berencana memberikan bantuan hibah berupa bangunan dan barang untuk sejumlah instansi vertikal di Mimika. Keputusan ini diambil berdasarkan kondisi keuangan daerah dan kesepakatan pimpinan, yang mencakup Bupati dan tim anggaran.

Hery Onawame, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, mengungkapkan beberapa rencana bantuan hibah yang telah diidentifikasi. Salah satunya adalah bantuan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) yang membutuhkan sebuah ambulans. "Kita upayakan dari pemkab, kemudian sedikit bangunan di pelabuhan SAR itu untuk mereka punya pos siaga," ujarnya.





Selain SAR, Pemkab Mimika juga merencanakan memberikan hibah sebuah mobil patroli untuk Polsek Kuala Kencana. “Di kejaksaan juga ada (hibah) tapi nanti saya lihat lagi, soal keseluruhan total dana untuk hibah (berbentuk bangunan dan barang) ini, kita lihat lagi, saya belum jumlahkan juga total nilainya berapa, dan itu juga kebijakan dari pimpinan,” tambah Hery Onawame.

Selain hibah pembangunan dan barang, Pemkab Mimika juga akan menyelesaikan hibah pembangunan kan-

tor Polsek Bandara baru Mozes Kilangin. “Sementara memang belum rampung polsek bandara itu, jadi mungkin ada sedikit penambahan, ada penimbunan dan penyelesaian, (dana) tidak sampai Rp 1 miliar mungkin Rp 500 juta,” tutupnya.

Rencana hibah ini menunjukkan komitmen Pemkab Mimika dalam memberikan dukungan kepada instansi vertikal untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas guna memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. **(BAPPEDA)**



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika

Foto: Bappeda



# Sudah Terhubung, Akses Bandara Mozes Kilangin dari Bundaran Petrosea Dituntaskan Tahun Ini

**P**EMBANGUNAN jalan akses yang menghubungkan Bundaran Petrosea ke Bandara Mozes Kilangin terus disebut oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Dalam proyek ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mimika menetapkan target penyelesaian pembangunan pada tahun ini.

Ir Robert Mayaut, Kepala Dinas PUPR Mimika, menjelaskan bahwa meskipun akses sudah terhubung, tahapannya masih sebatas penimbunan atau japat. Kendala yang dihadapi adalah adanya satu rumah milik masyarakat yang berada tepat di badan jalan. Rumah tersebut belum dapat dibongkar karena harga atau nilai ganti rugi yang diajukan oleh pemilik belum sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh penilai (appraisal).

Dinas PUPR terus berupaya menyelesaikan masalah pembebasan lahan dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pemilik. Meskipun demikian, Robert menyatakan bahwa pembangunan akan terus dilanjutkan, mengingat target penyelesaian pada tahun 2024.

Selain pengaspalan, pekerjaan tahun

ini juga mencakup pemasangan box culvert pada saluran air. Robert menjelaskan, "Nanti ini akan dilanjutkan, yang penting kita buka dulu. Kalau sudah terbuka, nanti mau diaspal, mau dipasang box culvert, yang penting kita sudah tembus di sana. Rencananya, peningkatannya akan disesuaikan dengan kebutuhan setelah tahap ini selesai," ungkapnya.

Dengan terus berlanjutnya proyek ini, diharapkan akses ke Bandara Mozes Kilangin dari Bundaran Petrosea dapat segera menjadi kenyataan, mempermudah mobilitas masyarakat dan mendukung konektivitas transportasi di wilayah Kabupaten Mimika. (BAPPEDA)



**Jalan akses yang menghubungkan Bundaran Petrosea ke Bandara Mozes Kilangin**

Foto: Bappeda

# Kantor Distrik Mimika Baru Janji Inovasi Pelayanan dengan Gedung Baru

**K**ANTOR Distrik Mimika Baru melaksanakan ibadah syukuran sebagai awal dari aktivitas pekerjaan dan pelayanan di gedung kantor baru mereka pada Senin (26/02/2024). Kepala Distrik Mimika Baru, Joel Luhukay, menyampaikan komitmen untuk menciptakan inovasi dalam pelayanan, memberikan pelayanan prima, dan memadai sehingga masyarakat merasa nyaman.

“Dengan kantor baru ini, Distrik Mimika Baru ingin menciptakan suatu inovasi, seperti memberikan pelayanan prima dan memadai sehingga masyarakat merasa nyaman,” ujar Joel Luhukay.

Joel menegaskan pentingnya pelayanan yang efisien dengan memberikan contoh bahwa pelayanan perorangan seharusnya hanya memakan waktu lima hingga sepuluh menit. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak perlu

menunggu lama-lama seperti sebelumnya.

“Saya sampaikan kepada seluruh staf, bahwa pelayanan perorangan itu kalau bisa lima menit saja, paling lama sepuluh menit. Masyarakat tidak boleh menunggu lama-lama seperti yang lalu-lalu,” terang Joel.

Selain itu, Joel akan berkoordinasi dengan petugas Dinas Pencatatan Sipil yang akan ditugaskan di Distrik Mimika Baru agar dapat mengikuti sistem pelayanan yang sudah ditetapkan. Ia menekankan pentingnya kehadiran tepat waktu.

“Kalau mulai pukul 08.00, berarti semua sudah harus di sini tepat waktu. Saya ingatkan staf juga, supaya nanti jangan jadi Disiplin yang tunggu-tunggu kita, ataupun sebaliknya,” katanya.

Joel juga mengungkapkan harapannya untuk tahun ini, Kantor Distrik Mimika Baru dapat melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan. Hal ini untuk memastikan data masyarakat akurat dan dapat digunakan saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Data dari RT dilaporkan ke lurah, lurah dan kepala kampung akan melapor ke kita (distrik). Supaya kita juga tahu, ada yang lahir atau ada yang meninggal,” terangnya.

Selain pemutakhiran data, Joel sedang berusaha agar stafnya dapat melakukan studi banding ke luar, memberikan kesempatan bagi staf untuk belajar tentang hal-hal baru di kecamatan yang sudah maju. **(BAPPEDA)**



Kantor Distrik Mimika Baru

Foto: Bappeda

# Pembangunan Gedung KPU Mimika Rampung

**G**EDUNG Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika telah berhasil diselesaikan dan diresmikan oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, dalam serangkaian peresmian sejumlah gedung pada Selasa (20/2). Meskipun bangunan KPU Mimika yang megah ini telah selesai, bagian landscape atau halaman depan masih dalam proses penyelesaian.

Proyek pembangunan gedung berlantai dua ini merupakan bagian dari program kerja Badan Kesatuan dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mimika, yang berlokasi di Jalan Hassanudin. Anggaran untuk proyek ini berasal dari APBD Induk Tahun 2023 dengan total dana sebesar Rp 14 mi-

liar. Pelaksanaan proyek ini ditangani oleh PT Papua Sinar Anugerah.

Yan Selamat Purba, Kepala Bakesbangpol, menyatakan bahwa bangunan kantor KPU sudah rampung dan diresmikan oleh Bupati Eltinus Omaleng. "Kemarin saat hendak diresmikan, sudah mulai dibersihkan, karena Bupati Mimika akan meninjau," ungkap Yan.

Menurut Yan, awalnya Kantor KPU ditargetkan untuk digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, tetapi beberapa pekerjaan belum selesai sesuai perencanaan awal. Waktu kontrak yang diberikan kepada kontraktor hanya 75 hari kerja, lebih singkat dari estimasi waktu kerja biasanya yang mencapai 90 hari.

Gres, pengawas proyek pembangunan

gedung KPU Mimika, menjelaskan bahwa gedung tersebut terdiri dari dua lantai dengan sentuhan warna putih, dihiasi dengan gambar burung cenderawasih dan tifa di setiap sisi bangunan. Plang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika juga terpasang di bagian depan gedung. Gedung ini memiliki 12 ruangan dan dilengkapi dengan 4 toilet. Selain itu, kantor KPU ini sudah dipagar keliling dan dilengkapi dengan dua pos penjagaan di pintu masuk dan keluar. Lahan parkir juga telah tersedia di belakang dan depan gedung.

Gres menyatakan bahwa luas pasti lokasi bangunan tidak diketahui, namun ia menegaskan bahwa bangunan tersebut telah siap digunakan dan akan diserahkan kepada KPU Mimika untuk pengaktifan gedung. **(BAPPEDA)**



Kantor KPU Mimika  
Foto: Bappeda

# Pemkab Mimika Susun RKPD 2025

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika telah memulai proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Kick Off meeting atau rapat perdana tersebut dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Mimika dan difasilitasi oleh Badan Perencana-

an dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika di Kantor Bappeda Mimika, Rabu (21/2).

Yohanna Paliling, Kepala Bappeda Mimika, mengungkapkan bahwa rapat tersebut menandai berakhirnya RKPD 2024 yang disusun pada 2023 dan dimulainya penyusunan RKPD 2025 di

tahun 2024. Ia menyatakan, kegiatan ini mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, di mana RKPD 2024 berakhir pada Desember 2023, dan pada tahun ini dimulai penyusunan untuk RKPD 2025.

"Hari ini kita mulai menyusun RKPD tahun 2025, itu memang jadwalnya begitu jadi kita akhiri yang 2024 pada



Desember tahun 2023, tahun ini kita mulai susun untuk Tahun 2025,” ungkap Yohanna.

Rapat tersebut menjadi awal dari tahapan penyusunan RKPD 2025, dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan RKPD, Rencana Kerja (Renja) di setiap OPD, sesuai kalender kegiatan Pemkab tahun 2025. Yohanna menekankan bahwa tahapan penyusunan akan disesuaikan dengan kebijakan pusat, nasional, dan provinsi.

Wilem Naa, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda

Mimika, menyatakan bahwa kick-off meeting ini merupakan upaya memberikan panduan dan timeline bagi seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Mimika. Ini dilakukan untuk penyamaan persepsi dan perspektif dalam penyusunan dokumen perencanaan yang akan dilakukan pada tahun 2025.

“Dalam upaya untuk mencapai target pembangunan, perencanaan Kabupaten Mimika yang akan dituangkan di dalam RKPD tahun 2025 harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Hal ini

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang kita hadapi di masa kini dan masa yang akan datang,” jelas Wilem Naa.

Selain itu, melalui proses perencanaan ini, Pemerintah Kabupaten Mimika akan merumuskan rancangan arah kebijakan dan isu-isu strategis. Semua ini akan didasarkan pada isu-isu strategis seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, penanganan inflasi, dan isu-isu penting lainnya untuk mencapai Mimika unggul. **(BAPPEDA)**



Foto: Bappeda

Aktifasi IKD Tertinggi Kabupaten di Wilayah Timur Indonesia

# Dukcapil Mimika Raih Penghargaan

**D**INAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika meraih Penghargaan Aktifasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) Tertinggi Kabupaten di Wilayah Timur Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil se-Indonesia, yang diselenggarakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Selasa (27/2). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Prof. Muhammad Tito Karnavian.

Rakornas ini dihadiri oleh lebih dari 1.200 peserta secara daring dan 1.500 peserta secara langsung dari jajaran Dukcapil Pusat, Dukcapil Provinsi, dan Dukcapil Kabupaten/Kota. Prof. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, dalam arahannya menekankan pentingnya evaluasi kinerja Dukcapil dalam pelayanan publik dan dukungan terhadap suksesnya pemilu serentak pada 14 Februari 2024 dan Pilkada yang akan digelar pada November 2024.

"Dukcapil harus terus berusaha mendorong kinerja layanan publik yang se-

makin baik. Inovasi dalam hal integritas, sistem, dan kompetensi harus terus ditingkatkan. Akurasi dan validitas data kependudukan sangatlah penting untuk perencanaan pembangunan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, sukseskan pemilu, dan lainnya," ujar Prof. Tito Karnavian.

Tema Rakornas, yaitu "Peran Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam mendukung percepatan transformasi digital untuk pelayanan publik," sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

"Penerapan GovTech di pemerintahan saat ini adalah proofpoint di 2024, meningkatkan Indeks EDGI Indonesia secara medium-term, dan pada dampak long-term, digitalisasi akan membangun birokrasi yang efisien dan efektif, pembangunan manusia yang maksimal, dan pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Dalam rakornas tersebut, Dukcapil Mimika meraih Penghargaan Aktifasi

IKD Tertinggi Kabupaten di Wilayah Timur Indonesia. Ini merupakan prestasi kedua kalinya setelah pada tahun 2022 lalu Dukcapil Mimika meraih Penghargaan kategori Dukcapil BISA di Tanah Papua.

Slamet Sutedjo, Kepala Dukcapil Mimika, menyampaikan terima kasih kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri, serta memberikan apresiasi tinggi kepada Pimpinan Daerah Kabupaten Mimika, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda yang terus memberikan dukungan, arahan, dan kebijakan strategis dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya Adminduk kepada masyarakat Mimika.

"Penghargaan ini kami dedikasikan untuk partisipasi aktif masyarakat Mimika dalam mendukung program Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA), khususnya Aktifasi IKD yang saat ini sudah mencapai 14.768 orang yang sudah memiliki dan mengaktifkan IKD/KTP Digital. Dan akan terus meningkat ke depannya," ungkap Slamet Sutedjo.

(BAPPEDA)



Foto: Bappeda

# Pemkab Mimika Bentuk Satgas Penanganan ASF

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) serta stakeholder terkait telah membentuk Satgas penanganan Virus African Swine Fever (ASF) sebagai respons terhadap wabah yang telah menyebabkan kematian ratusan ekor babi di Timika.

Kepala Disnakeswan, Sabelina Fitriani, menjelaskan bahwa pembentukan satgas ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran wabah ASF. "Ini bertujuan bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mengatasi wabah ini, karena sudah menyangkut banyak hal-hal lain," kata Sabelina Fitriani.

Satgas ini akan melibatkan beberapa instansi, termasuk Balai Karantina, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Polres Mimika, Polsek KP3 Laut, Polsek KP3 Udara, Kodim 1710/Mimika, Anggota DPRD, serta kepala-kepala distrik di zona merah penyebaran virus ASF.

Ketua Komisi B DPRD, Nurman Karupukaro, mengakui bahwa wabah ASF merupakan yang pertama kali terjadi di Timika dan memerlukan penanganan yang serius. "Dengan membentuk satgas, kita harapkan penanganan dapat terorganisir dengan baik, terpadu, dan selesai dalam waktu dekat. Tanpa satgas, pekerjaan ini tidak akan selesai,"

ujarnya.

Langkah pertama yang akan diambil oleh satgas adalah menutup sementara mobilisasi ternak babi baik keluar maupun masuk. "Setelah satgas menyelesaikan tugasnya, ini bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain," tambahnya.

Laporan terbaru dari Disnakeswan mencatat bahwa angka kematian ternak babi akibat ASF sudah mencapai 362 ekor pada Kamis (1/2). Satgas diharapkan dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan dan mengatasi wabah ini demi melindungi sumber pangan masyarakat. (BAPPEDA)



# Capaian Nilai MCP KPK Pemkab Mimika Meningkat

**D**ALAM rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mewujudkan pencegahan korupsi, Kedeputan Koordinasi Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, membahas hasil evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023.

Rapat tersebut dihadiri oleh Pj Sekda Mimika, Ida Wahyu, dan berlangsung di ballroom Hotel Horison Diana Mimika pada Kamis (29/2/2024).

Nurul Ikhsan Al Huda, Kasatgas KPK Korsup, menyampaikan bahwa meskipun Kabupaten Mimika masih jauh dari peringkat nasional dengan skor 57,77 dalam MCP Tahun 2023, namun capaian ini menunjukkan peningkatan. Dua kabupaten dengan capaian terendah di Papua Tengah, Deiyai dan Dogiyai, memperoleh skor 30,87 dan 35,69.

"Meski Mimika tertinggi di Papua Tengah, tapi secara nasional masih jauh. Seharusnya Mimika lebih baik, dan kami mengapresiasi upaya untuk terus meningkatkan nilai," ujarnya.

Nurul menyoroti bahwa nilai MCP

Mimika terendah terletak pada pengelolaan barang milik negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa capaian tinggi pada area lain menunjukkan potensi Kabupaten Mimika untuk mencapai nilai MCP yang lebih baik secara keseluruhan.

Sementara itu, Penjabat Sekda Mimika, Ida Wahyuni, menyampaikan beberapa keberhasilan yang telah dicapai, antara lain capaian MCP Tahun 2023 sebesar 50 persen, tata



**Penjabat Sekda Mimika, Ida Wahyuni, menyampaikan beberapa keberhasilan yang telah dicapai**



kelola desa Tahun 2023 sebesar 65,80 persen, dan skor SPI Tahun 2023 sebesar 54,22. Meskipun demikian, Pemkab Mimika masih menghadapi tantangan terkait penertiban aset, tunggakan pajak, dan pendapatan daerah dari deviden saham PT Freeport Indonesia yang belum tuntas sejak 2018.

Ida Wahyuni menegaskan komitmen Pemkab Mimika untuk menjalankan rencana aksi program pemberantasan korupsi secara terintegrasi, konsisten, dan terencana melalui MCP. Langkah-langkah ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Mimika. Pemerintah setempat berharap dapat mencapai standar nasional dan terus bekerja menuju pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda



# Pemkab Mimika Integrasikan SIPD ke SIRUP

**P**EMERINTAH Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Mimika menggelar kegiatan sosialisasi skema integrasi aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Daerah (SIPD-RI) ke Sistem In-

formasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP-LKPP), serta memberikan pendampingan pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang regulasi dan teknis penginputan RUP di lingkup Pemkab

Mimika.

Willem Naa, Assisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Mimika, membuka acara tersebut dan menekankan pentingnya keterbukaan dan ketepatan waktu dalam menginputkan data SIPD-RI dan



SIRUP-LKPP serta RUP tahun 2024. Dalam sambutannya, Willem Naa mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hal baru dan merupakan praktik rutin di kabupaten ini.

“Bagi saya ini bukan hal yang baru dan ini hal yang biasa dilakukan di kabupaten ini, kalau kemarin tahun kemarin mungkin lambat (input) pastikan tahun ini lebih baik dari tahun lalu,” tegasnya.

Ia juga meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawasi proses pen-



ginputan RUP, yang merupakan bagian dari upaya perubahan menuju efisiensi dan keterbukaan dalam sistem pengadaan barang dan jasa di kabupaten tersebut. “Hari ini kita harus berubah untuk lebih baik kedepan,” tambahnya.

Bambang Wijaksono, Kepala BPBJ Setda Mimika, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang regulasi dan teknis penginputan RUP di lingkup Pemkab Mimika. Ia juga menyampaikan tujuan lainnya, yaitu melaksanakan penginputan RUP pada aplikasi SiRUP LKPP dan memastikan terumumkannya seluruh RUP di Pemkab Mimika Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dengan mengundang narasumber dari LKPP RI untuk menyampaikan teknis-teknis penginputan. Selain itu, peserta yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Program (Kasubag Program) diharapkan dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di daerah tersebut. **(BAPPEDA)**

Foto: Bappeda

# Pemkab Mulai Gerakan Pangan Murah

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), Bulog, dan para agen serta distributor, menggelar kembali Gerakan Pangan Murah serta melakukan launching penyaluran cadangan pangan. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Pasar eks Pasar Swadaya pada Jumat (23/2).

Gerakan Pangan Murah ini akan dilaksanakan setiap bulannya selama tahun 2024, mengikuti jejak tahun 2023. Pembukaan pasar murah dimulai dari pukul 09.00 WIT hingga siang hari pukul 12.00 WIT. Warga tampak antusias mengantri untuk membeli kebutuhan pokok, terutama sembako.

Ragam kebutuhan dijual dalam pasar murah ini melibatkan berbagai produk, termasuk beras, gula, minyak goreng, telur ayam, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, tomat, cabai, sagu, es cream, supermi, susu, sirup ABC, kentang, wortel, kopi, teh, dan bahan kebutuhan pokok lainnya.

Ida Wahyuni, Penjabat (Pj) Sekda Mimika, dalam sambutan yang dibacakan atas nama Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah merupakan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, di bawah harga pasar, dan untuk



menjaga ketersediaan bahan pangan.

Ida Wahyuni menekankan bahwa gerakan pangan murah ini akan dilaksanakan secara bergiliran di wilayah distrik, kelurahan, dan

kampung sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama dengan distributor dan pelaku pangan seperti Bulog, peternak unggas, dan petani menjadi kunci sukses

dalam menyediakan produk pangan berkualitas.

Dalam kesempatan ini, dilakukan juga peluncuran penyaluran pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan tahun 2024. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, menurunkan stunting, mengendalikan harga pangan, dan melindungi produsen serta konsumen. Penyaluran ini menyasar 18 distrik se-Kabupaten Mimika, terutama bagi masyarakat miskin dan yang mengalami rawan pangan dan gizi. Penerima bantuan ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat kementerian.

Harapannya, dengan adanya gerakan pangan murah, operasi pasar murah, dan penyaluran cadangan pangan, masyarakat dapat merasakan bantuan dalam meredam kesulitan akibat lonjakan harga yang masih tinggi hingga saat ini.

Yulius Koga, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika, menjelaskan bahwa pasar murah ini merupakan pembukaan dari program yang akan berlangsung sepanjang tahun, dijadwalkan setiap bulan dua kali. Produk yang dijual melibatkan berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng bekerja sama dengan Bulog, telur, dan daging ayam.

Dalam kegiatan ini, diperkirakan anggaran sebesar Rp3 miliar telah dialokasikan untuk 30 kali kegiatan operasi pasar murah selama satu tahun. Riyadi Muslim, Kepala Bulog Mimika, menambahkan bahwa Bulog menyediakan beras medium sebanyak 4 ton dan beras SPHP sebanyak 2 ton, serta minyak sebanyak 1200 karton, yang dijual dengan harga subsidi. **(BAPPEDA)**



Foto: Bappeda

# Bupati Mimika Hadiri HUT ke-169 Pekabaran Injil di Tanah Papua

**U**MAT Kristen di Tanah Papua merayakan momen bersejarah, yakni HUT ke-169 Pekabaran Injil di Papua, yang jatuh pada tanggal 5 Fe-

bruari 2024. Perayaan tersebut diselenggarakan dengan khidmat di Halaman Kantor Klasik GKI Mimika, Jalan Poros Irigasi - SP5, Senin kemarin (5/2/2024).

Ibadah peringatan dimulai dengan penuh kekhusyukan dan dipimpin oleh Pdt Rainer Scheunemann. Dalam khotbahnya, Pdt Rainer menekankan



Foto: Bappeda



Foto: Bappeda

pentingnya pengingat bahwa Injil Yesus-lah yang menyatukan tanah Papua dan membawa damai bagi penduduknya.

Injil pertama kali memasuki Papua melalui Pulau Mansinam, Teluk Doreh, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dibawa oleh dua misionaris

Jerman, Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler.

“Bukan hanya dari Jerman, banyak juga dari negara-negara lain seperti



Foto: Bappeda



Kanada Amerika, para biarawan, biarwati Katolik, dan para frater Katolik yang membawa Injil ke Papua. Yang terpenting adalah Injil Yesus tersampaikan kepada semua orang di Tanah Papua, tidak peduli denominasi gerejanya,” ujar Pdt Rainer.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, yang turut hadir dalam peringatan tersebut, mengajak seluruh hadirin untuk mengenang pentingnya peristiwa bersejarah ini bagi Umat Kristen di Tanah Papua. Beliau menegaskan bahwa masuknya Ottow dan Geissler dengan membawa ajaran Injil adalah karunia luar biasa bagi Tanah Papua.

“Papua harus hidup dalam damai, Papua adalah Indonesia yang sesungguhnya, yang memiliki sikap toleransi yang besar kepada setiap umat beragama. Mari kita saling menjaga dan tidak saling membeda-bedakan,” kata Bupati Omaleng dalam pesannya.

Bupati Omaleng juga menekankan pentingnya nilai-nilai agama sebagai pendorong dan pengarah bagi kehidupan masyarakat. Ia mengajak semua pihak untuk terus menjaga stabilitas keamanan di tengah pembangunan yang berlangsung di Mimika.

“Sebagai umat Kristen di Tanah Papua, kita harus percaya dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak hanya





percaya, tetapi juga harus melakukan," tegasnya.

Peringatan HUT ke-169 Pekabaran Injil di Tanah Papua menjadi momen penting bagi Umat Kristen untuk

terus memperkokoh iman, menjaga persatuan, serta berkontribusi positif dalam membangun daerah dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

# Bupati Mimika dan MRP Papua Tengah Gelar Rapat Koordinasi Untuk Mendukung Caleg OAP di Pemilu 2024

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forko-pimda) menggelar rapat koordinasi guna menyukseskan Pemilu 2024. Rapat ini berlangsung di Hotel Cenderawasih 66 pada Sabtu (10/2/2024).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Ang-

gaibak, Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra, para Dansat di Mimika, serta perwakilan dari KPU dan Bawaslu. Turut hadir juga tokoh agama, tokoh masyarakat suku Amungme dan Kamoro, serta para calon legislatif DPRD Mimika dan DPRD Provinsi Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH menyatakan bahwa rapat tersebut merupakan langkah penting dalam mempersiapkan

Pemilu 2024. Ia juga menegaskan pentingnya dukungan bagi calon anggota legislatif orang asli Papua (OAP).

"Pertemuan hari ini sangat penting bagi kita dan tidak pernah mengenal lelah untuk menghadapi pesta demokrasi ini. Jadi rapat ini atas inisiasi dari MRP Papua Tengah," kata Eltinus Omaleng.

Eltinus menekankan bahwa semua komponen masyarakat harus memper-



juangkan otonomi khusus dan mendukung partisipasi OAP dalam proses pemilihan umum. Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan OAP dalam jabatan-jabatan strategis di tingkat daerah.

"Kita harus memperjuangkan otonomi khusus dan sudah saatnya kita memimpin. Selama ini lebih banyak jabatan diemban oleh orang dari luar bukan anak asli Mimika. Saya minta teman-teman dari luar berikan kesempatan kepada orang Papua," ujarnya.

Eltinus juga mengajak para calon legislatif OAP untuk bersatu dan memperjuangkan aspirasi mereka. Ia memohon kepada MRP Papua Tengah untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mendukung keterlibatan OAP di legislatif dan pemerintahan.

"Ini perlu, bupati, wakil bupati, DPRD pemimpinnya harus orang Papua sesuai UU Otsus. Kami bisa memimpin masyarakat," katanya.



Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan dapat terwujudnya kesadaran akan pentingnya partisipasi dan representasi OAP dalam pembangunan

daerah serta pemerintahan, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih inklusif dan mewakili seluruh lapisan masyarakat Papua. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda



# Bupati Mimika Gratiskan Biaya Sekolah Hingga SMA

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika dalam hal ini Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, SE MH telah mengambil kebijakan dengan mengalokasikan 20 persen Anggaran Belanja Daerah untuk sektor pendidikan.

Selain untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana sekolah, anggaran ini juga dialokasikan untuk biaya pendidikan lewat Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA).

Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Jeni Usmani mengungkapkan anggaran BOPDA baik untuk sekolah negeri mau-

pun swasta telah dinaikkan. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Jadi dana yang dikelola sekolah kini semakin besar karena ada dana BOS dari pusat dan BOPDA.

Untuk itu, dengan meningkatnya dana untuk sekolah maka Dinas Pendidikan mengambil kebijakan untuk menggratiskan biaya sekolah di seluruh sekolah negeri terhitung mulai 1 Januari 2024. "Jadi misalnya siswa baru tidak ada uang formulir, tidak ada pengembangan dan lain-lain," katanya.

Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan

Mimika juga mengalokasikan anggaran untuk pembayaran SPP bagi anak Amungme dan Kamoro yang bersekolah di sekolah yayasan. Sementara pelajar yang ada di pedalaman justru sejak lama sudah mendapatkan pendidikan gratis, bahkan dibantu dalam hal pengadaan seragam sekolah hingga pemberian makanan tambahan.

Kebijakan ini dikatakan Jeny Usmani sebagai upaya Pemkab Mimika dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses pendidikan terutama di sekolah negeri mulai dari SD, SMP





bahkan mulai 1 Januari biaya sekolah untuk semua SMA negeri di Mimika sudah digratiskan.

"Masyarakat tidak membayar karena dibiayai oleh pemerintah. Kita berterima kasih kepada Bupati karena dengan adanya mandatory itu cukup biayai semua. Di sekolah ada dana BOS, Bopda. Terus guru honorinya tidak dibayar sekolah karena ada ada PPPK dan guru kontrak," jelasnya.

Sementara untuk sekolah swasta, dikatakan Jeni tidak bisa dipaksakan untuk digratiskan. Tapi sekolah yayasan yang juga mendapat alokasi dana BOS, Bopda bahkan KIP setidaknya bisa mengurangi beban. Misalnya, biaya yang harus dibebankan kepada murid Rp 500 ribu per bulan maka harus dipotong dengan besaran yang ditanggung BOS, BOPDA dan KIP. Selisihnya yang dibayar orang tua.

"Jadi dia tidak bisa general, trus uang BOS dan Bopda itu dikemanakan karena yayasan juga dapat. Jadi tidak ada perbedaan sekolah negeri dan yayasan dalam hal pembiayaan. Karena pembiayaan itu membiayai anak bukan biayai yayasan. Karena yayasan punya

AD ART, dana BOS, Bopda itu memudahkan anak dapat akses layanan pendidikan," tegasnya.

Bahkan untuk anak Amungme dan Kamoro yang bersekolah di sekolah yayasan akan mendapat biaya SPP sebesar Rp 150 ribu per anak untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Sedangkan yang di SMK mendapat SPP Rp 200 ribu per anak.

Jeny menambahkan, penerapan sekolah gratis untuk SMK masih sementara dikaji mengingat besaran biaya yang digunakan karena SMK menerapkan praktek kerja industri. Namun Dinas Pendidikan sedang menjajaki kerja sama dengan lembaga vokasi yang dibangun Kemendikbud di Cimahi. Apakah guru yang akan dikirim untuk pelatihan, atau instruktur yang didatangkan ke Timika untuk melatih guru.

Terkait dengan peningkatan dana BOPDA setiap sekolah, termasuk untuk sekolah pedalaman yang disalurkan dengan sistem block grant bukan berdasarkan jumlah siswa, maka Dinas Pendidikan menekankan sekolah untuk tidak melakukan manipulasi data murid hanya untuk mendapat dana BOS dan

BOPDA yang besar. Sebab mark up data siswa yang tidak sesuai data rill berdampak pada IPM dan kinerja pendidikan.

"Jadi itu harus divalidkan, kepala sekolah tidak perlu takut bahwa kekurangan dana. Karena misalnya seragam dibiayai pemerintah, guru diantar, gurunya dikontrak kalau PNS dan PPPK tidak cukup. Jadi tidak ada masalah, tidak perlu menaikkan jumlah murid untuk mendapatkan uang," ujarnya.

Salah satu alasan sekolah menarik pungutan selama ini adalah untuk membayar guru honor. Jeny Usmani menyatakan bahwa kekurangan guru sesuai kebutuhan akan dijawab dengan pengadaan guru kontrak yang digaji oleh Dinas Pendidikan. Tapi ini khusus untuk sekolah negeri. Dengan begitu, sekolah tidak lagi menggunakan dana BOS dan BOPDA untuk membayar guru honor tapi untuk membiayai anak.

Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat diminta turut melakukan pengawasan dan kontrol. Jika masih ada sekolah negeri yang menarik pungutan, maka orang tua diminta melapor ke Dinas Pendidikan. **(BAPPEDA)**



Foto: Bappeda

# Pemkab Mimika dan Generasi Muda Deklarasikan Pemilih

**P**EMERINTAH Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bersama generasi muda di Mimika telah melakukan deklarasi pemilih cerdas di Hotel Cartenz pada Rabu (7/2). Deklarasi ini

mengusung tema “Suara Kita Menentukan Masa Depan Bangsa” dan dibuka secara resmi oleh Ida Wahyuni, Pj Sekda Mimika.

Ida Wahyuni, Pj Sekda Mimika, menyampaikan bahwa pemilihan umum

tahun 2024 sudah di depan mata dan peran pemuda memiliki arti penting dalam membentuk masa depan politik negara. Keterlibatan generasi muda pada pemilu 2024 menjadi kunci sukses menuju Indonesia emas 2045.



Foto: Bappeda

Dalam pembukaan deklarasi, Ida Wahyuni menyampaikan empat pesan penting kepada generasi muda di Mimika. Pertama, pentingnya berkontribusi dalam menanamkan kesadaran politik kepada sesama generasi. Pemuda diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam mendiskusikan isu politik, memahami program-program kandidat, dan berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum.

Kedua, generasi muda perlu mempersiapkan diri dan memastikan kebe-

radaannya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengecekan DPT menjadi langkah untuk memastikan bahwa suara generasi muda dapat tersampaikan dengan baik pada pemilu.

Ketiga, pentingnya mencari informasi tentang calon pemimpin melalui media sosial dan internet. Informasi tersebut dapat menjadi acuan untuk melihat rekam jejak dan kebijakan calon pemimpin.

Keempat, identifikasi visi-misi calon pemimpin. Generasi muda diharapkan memahami visi dan misi calon pemim-

pin sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan.

Dalam isi deklarasi, generasi muda Mimika menyatakan penolakan terhadap golput dan kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 secara damai dan cerdas. Mereka juga berkomitmen untuk membantu mencegah penyebaran berita hoaks dan isu SARA, serta menyebarkan pesan-pesan damai dalam pemilu 2024 dengan tujuan mensukseskan pesta demokrasi di Mimika. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

**EMERGENCY**

**IRD**

**WASHTASITIGAWAU TIAKUNAT  
ISID MIMIKA**

**INSTALASI  
KAWAT  
DARURAT  
IRD**



**Mimika Membangun**